

BAHASA-SASTRA SEBAGAI REPRESENTASI PEMIKIRAN-KEKUASAAN**Pardi Suratno**

Balai Bahasa Jawa Tengah

Selama ini *hanya* sastra yang dinilai tidak lahir dari kekosongan budaya. Teeuw (1986) menyatakan bahwa karya sastra tidak jatuh dari langit atau tidak lahir dari kekosongan budaya. Karya sastra harus dipandang sebagai anak zamannya yang mengutarakan corak kehidupan, cita-cita, aspirasi, dan perilaku masyarakatnya sebagai media pewarisan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra dalam hakikatnya merupakan interpretasi atas kehidupan. Maksudnya, kehadiran sebuah karya sastra, baik puisi, prosa, maupun drama, selalu memiliki latar belakang yang menjadi penyebab atau sumber inspirasi bagi pengarang, penerbit, dan masyarakat dalam kelahiran karya tersebut. Padahal, sesungguhnya, bahasa (ekspresi kata, prasa, ungkapan, kalimat, dan wacana) juga tidak mungkin muncul tanpa latar belakang pemikiran tertentu. Dalam berbicara atau menulis, seseorang pastilah memiliki kepentingan yang hendak diraih melalui ungkapan bahasa. Dengan demikian, melalui forum ini, saya dapat menyatakan bahwa pemakaian bahasa (*language*) dan kehadiran karya sastra (*literature*) tidak terlepas dari konteks sosial-budaya kepentingan individual seseorang sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunikasi. Dalam konteks komunikasi, bahasa hanyalah sebagai media. Kemudian, sebagai media sudah barang tentu bahasa termuat oleh kepentingan yang dalam dunia sastra dinyatakan sastra tidak jatuh dari langit atau sastra tidak lahir dari kekosongan budaya.

Ketika pendiri bangsa ini mulai memikirkan untuk mengikat semua elemen yang berada di wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke sudah memikirkan kondisi dan situasi sosial budaya yang mewarnai wilayah yang pada kelak kemudian hari disebut Indonesia ini. Bahkan, jauh sebelum itu kesadaran bahwa variasi sosial-budaya itu telah ada. Pada zaman Majapahit dikenal ungkapan *bhinneka tunggal ika tan hana darma mangwa* pasti tidak lahir tanpa konsep yang melatarinya. Kemudian, sebelum dan setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pendiri bangsa mengambil ungkapan atau semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* itu tidak mungkin tanpa pemahaman situasi sosial budaya. Pastilah dapat disaksikan bahwa semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* lahir dari kondisi sosial, budaya, bahasa, agama, adat-istiadat, dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang beragam (*ber-bineka*) yang sengaja dan harus disadari untuk membuat ikatan sebagai sebuah bangsa. Semboyan itupun tidak menyurut hingga saat ini, tetapi justru semakin diteguhkan bahwa keelokan Indonesia justru terletak dalam kebinekaan tersebut. Dalam kehidupan global yang sangat dinamis dan majemuk sejalan dengan memasukkan budaya asing, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* justru semakin disadari dan diteguhkan sehingga termasuk dalam pilar utama dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ungkapan atau bahasa yang sering disebut bias makna pada masa pemerintahan Orde Baru pun pastilah lahir dari latar belakang sosial budaya. Di samping itu, kemunculan ungkapan sejenis itu sedikit banyak sesuai dengan kondisi dan orientasi penguasa yang berlatar belakang kepentingan demi kebaikan yang hendak diraih, baik dalam skala sempit maupun skala luas. Kata *kekuasaan* dalam hal ini dapat berarti individu atau negara tergantung wilayah yang terimbas oleh bahasa tersebut. Pemakaian kata *penyesuaian harga* (untuk makna kenaikan harga barang), *diamankan* (untuk mewadahi makna ditahan oleh pihak polisi atau pihak berwajib), dan *penyesuaian tarif* (untuk makna kenaikan tarif) pada waktu itu sebagai pilihan bahasa yang *tepat* di tengah kepentingan utama kestabilan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pemakaian ungkapan *gotong royong*, *ing ngarsa sung tuladha*, *jer basuki mawa beya*, dan sejenisnya pasti telah disesuaikan dengan keinginan dan kondisi sosial kebangsaan yang ada.

Pada masa reformasi (bahkan, beberapa tahun menjelang reformasi 1998) seiring dengan keterbukaan kehidupan masyarakat sebagai pengaruh dunia global pemakaian bahasa juga mengalami perubahan, baik bahasa dalam kehidupan *lumrah* (dalam komunikasi wajar) maupun bahasa sastra. Pada masa itu kata-kata seperti pada masa Orde Baru mulai ditinggalkan dan diganti dengan bahasa yang menyatakan pemikiran yang transparan dan objektif. Sebagai misal, lazim digunakan kata *luber* (langsung umum bebas, dan rahasia) terkait dengan pemilu

menjadi atau ditambah dengan *luber* dan *jurdil* (ditambah *jujur* dan *adil*), *keterbukaan*, *demokrasi*, *voting*, *politik uang*, *kegagalan*, dan sejenisnya. Pada masa kini setelah kehidupan semakin transparan dan bebas pemakaian bahasa pun mengalami perubahan. Pada zaman dahulu dikenal istilah *wanita tuna susila* (disingkat WTS ketika susila atau etika-moral menjadi ukuran derajat seseorang) untuk menyebut *pelayan seks* (baik resmi maupu ilegal) sekarang itu diganti dengan *pekerja seks komersial*. Sudah pasti antara kata *wanita tuna susila* berbeda maknanya dengan *pekerja seks komersial* (disingkat PSK). Pada bahasa WTS ditekankan bahwa pelaku dipandang sebagai seorang yang *cacad secara susila* (dan *susila* cenderung dekat dengan *moral* atau *etika*). WTS dinilai sebagai sebagai orang yang *cacad moral*. Kondisi itu berbeda dengan masa kini yang menggunakan bahasa *pekerja seks komersial* (yang pasti dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menetralkan makna sehingga lambat laun tindakan melakukan seks di luar ikatan perkawinan menjadi *sah* atau *legal* (tidak dinilai negatif dari sisi moral, terlebih dari sisi etika). Kata *seks* juga berubah menjadi sesuatu yang *netral*, *komersial* juga *cenderung netral*, serta *pekerja* jauh lebih dahsyat karena pelaku *pelacuran* itu disamakan dengan *pekerja* (seperti *pedagang*, *tukang*, dan sebagainya). Apakah perubahan pemakaian bahasa dari *wanita tuna susila* yang semula disebut *pelacur* dan seorang yang *cacad moral* sama dengan *pekerja seks komersial*? Jawabnya, pastilah tidak dan pemunculan kata terakhir itu (*pekerja seks komersial*) tidak mungkin tanpa muatan makna apa pun. Jika ditarik lebih jauh, pemakaian bahasa *voting*, *pasar bebas*, *persamaan hak*, *solidaritas*, dan sebagainya pasti ada pandangan yang melatarbelakangi penggunaan sehingga bangsa Indonesia harus cermat dan wajib mencermati setiap pemakaian bahasa itu. Dengan demikian, betapa dahsyatnya sebuah bahasa yang kelahirannya didasari pemikiran tertentu untuk menciptakan dan membangun kondisi tertentu pula. Dalam dunia pendidikan, pastilah perubahan pemakaian *murid*, *siswa*, *pembelajar*, dan sekarang *peserta didik* dilatarbelakangi oleh keinginan dan harapan tertentu. Pada akhir-akhir ini, kalangan pendidik sering berurusan dengan pihak berwajib akibat pemakaian bahasa dalam media sosial. Dapat dipastikan ketika seorang guru mengatakan kepada orangtua peserta didik *Dia memang cantik, tapi mulutnya itu kotor* tidak akan lepas dari latar belakang keinginan. Dengan ungkapan itu, sang guru harus mondar-mandir ke pengadilan untuk urusan yang tidak lain lahir dari pemakaian bahasa.

Terakhir sebelum beralih ke hubungan sastra dan kekuasaan, saya harus menyodorkan apakah pasar bebas itu tidak ditentukan oleh dan berdampak terhadap bahasa. Kemudian, apakah pemilik modal asing beserta tenaga kerja asing juga tidak memanfaatkan bahasa sebagai media membentuk perilaku sosial masyarakat di negara tujuan? Saya yakin semua pihak menyadari sepenuhnya bahwa semakin besar modal dan semakin banyak tenaga kerja asing akan semakin menguat pemakaian bahasa asing Indonesia yang dibawa oleh pemilik modal dan pekerja asing. Sekarang sudah bukan rahasia lagi kenyataan bahwa keberadaan bahasa Indonesia semakin *marginal* (atau terdesak oleh pemakaian bahasa asing). Oleh sebab itu, secara budaya hendaknya kehadiran pihak luar tidak harus mengubah kekayaan budaya dan identitas bangsa. Namun, belum semua pihak menyadari hal itu secara baik didasarkan oleh pemikiran yang bijaksana dan wawasan yang luas. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia dan pastinya juga terjadi di negara lain. Tidak tertutup kemungkinan dalam bahasa terjadi kondisi *tunggak jarak mrajak*, sebaliknya *tunggal jati mati* (bahasa Indonesia yang besar semakin surut, sebaliknya bahasa asing yang minirotas semakin besar).

Sastra memang tidak lahir dari kekosongan budaya. Kehadiran karya sastra memiliki tujuan tertentu dalam memengaruhi dan membentuk perilaku pembaca. Perilaku itu dapat berupa pemikiran dan tindakan, baik yang lahiriah maupun yang konseptual dan mendasar. Hingga saat ini masih banyak pihak mengakui bahwa kungkungan budaya kolonial akibat lamanya sebagai bangsa terjajah menjadi penyebab sulitnya pembangunan karakter bangsa. Oleh sebab itu, keinginan untuk memperbaiki karakter bangsa telah menjadi perhatian serius sejak beberapa masa silam. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang menggali nilai-nilai kearifan dan keunggulan yang dituangkan dalam *Eka Prasetya Pancakarsa* dengan butir-butir *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, sebenarnya, dilakukan dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Selanjutnya, pada dewasa ini, gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh

Pemerintah (Presiden) dengan *Kabinet Kerja* serta *Nawacita* juga sebagai upaya pembangunan karakter.

Setelah beranjak dari budaya dalam sistem pemerintahan tradisional-istana, bangsa kita memasuki peradaban sebagai bangsa terjajah. Pada waktu itu bahasa dan sastra menjadi media bagi penjajah dalam mendikte pemikiran dan perilaku kaum pribumi. Oleh sebab itu, sebagai akibat dominasi kolonial relasi penjajah-terjajah bersifat vertikal dan langsung. Teknik pewarisan pendidikan secara langsung semacam itu tentunya tidak relevan lagi bagi generasi muda masa kini yang hidup di alam kebebasan (tidak hidup dalam situasi pewarisan pengetahuan secara vertikal, istilah Jawa *diajari* dan *diwedeni*). Pada masa kolonial Belanda bangsa kita kehilangan momen sastra sebagai media pendidikan karakter yang mandiri. Kuatnya pengaruh dan politik kolonial Belanda menyebabkan karakter masyarakat pribumi sangat dikendalikan dan dibentuk oleh Belanda melalui pendidikan formal Barat. Bacaan sastra dikendalikan oleh pemerintah Belanda yang tujuan utamanya adalah melanggengkan kekuasaan penjajah. Akibatnya, karakter masyarakat pribumi menjadi *objek, inlander, the orient*, yang sangat mengidolakan Belanda sebagai *superior* dan *subjek*. Pembaca dapat menyaksikan novel berbahasa Melayu dan Jawa yang hampir semuanya mendeskreditkan pribumi dan menonjol Barat. Masyarakat pribumi dicitrakan sebagai sosok yang *tidak rasional, berpikir dengan perasaan, tidak cerdas, ceroboh, tidak jujur, bodoh, takhayul, peminum, penjudi, pencuri*, dan sikap negatif lainnya. Sebaliknya, Barat dicitrakan sebagai sosok yang *cerdas, bersih, jujur, sosial, disiplin, objektif*, dan sejenis sifat positif lainnya. Oleh sebab itu, adanya ciri karakter pribumi yang tradisional, tidak jujur, pemalas, bodoh, ceroboh, dan percaya *gugon tuhon* itu memang sengaja *dilabeli* oleh penjajah Belanda (bukan karakter asli pribumi). Akibatnya, masyarakat pribumi mengalami ketergantungan dan bersifat Barat *oriented* sebagai bentuk memasuki derajat modern. Jejak-jejak dominasi penjajah Belanda dapat disimak pada novel sastra Indonesia terbitan *Balai Pustaka* (dalam bahasa Jawa *Bale Pustaka*) seperti *Belunggu, Siti Nurbaya, Salah Asuhan*, cerpen *Robohnya Surau Kami* dan novel berbahasa Jawa berjudul *Sukaca, Suwarso-Warsiyah, Saking Papa dumugi Mulya, Gambar Mbabar Wewados*, dan *Wisaning Agesang*. Dalam novel *Salah Asuhan*, tampak jelas bagaimana Belanda mendoktrin pribumi untuk mengagumi Belanda. Melalui tokoh Hanafi, pengarang (dalam hal ini pengarang hanyalah kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda), Belanda bermaksud mencela budaya dan cara berpikir pribumi. Sebaliknya, secara dominatif, Belanda mengharuskan pribumi mengikuti cara berpikir dan berperilaku Belanda. Melalui pertengkaran antara Hanafi dengan Ibunya, dapat dipahami bahwa novel itu mewacanakan generasi muda yang menolak budaya tradisi dan hendak menjadikan dirinya Barat atau Belanda. Namun, sekali lagi, cara berpikir itu sebenarnya didoktrin oleh Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menyebarkan penerbitan karya sastra melalui *Balai Pustaka* dan masyarakat pribumi hasil pendidikan formal Barat diharapkan menerima secara pasif (Faruk, 2007). Di samping itu, pemerintah berharap kaum terpelajara pribumi belajar menulis sendiri. Akan tetapi, dapat diduga bahwa intelektual baru pribumi hasil pendidikan formal Belanda tentu mengikuti pemikiran dari bacaan sastra *Balai Pustaka*.

Sastra zaman kolonial kurang memadai dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter. Bahkan, jauh dari manfaat yang diharapkan bagi pencerdasan dan penanaman nilai etika, nasionalisme, dan kemampuan emosional lainnya. Terlebih lagi jika karya sastra kolonial dibaca secara linear. Sebaliknya, jika karya zaman kolonial dibaca secara dikonstruksi (pembacaan berbalik dari cara membaca yang sudah *lazim* selama ini), barulah ditemukan makna sastra sebagai pendidikan karakter, terutama terkait dengan sikap kemandirian sebagai sebuah bangsa. Misalnya, melalui Hanafi dalam novel *Salah Asuhan*, Belanda sengaja membentuk kalangan tua pribumi berubah pikiran untuk mengikuti budaya Barat. Bahkan, kalangan tua (diwakili oleh Ibu Hanafi) harus *mati kutu* menghadapi sikap dan pandangan Hanafi yang menilai budaya tradisi atau Timur itu kampungan. Pada akhirnya, sang Ibu merasa *bimbang* terhadap perilaku Hanafi yang kebelanda-belandaan serta semakin jauh dari budaya masyarakat Melayu. Kepatuhan terhadap kebijakan kolonial Belanda juga dapat dicermati dalam novel *Merantau ke Barat* karya Adi Negro. Novel itu mengangkat ketidakberdayaan pribumi dalam bersikap mandiri dan

kepatuhan pribumi terhadap Barat. Sekali lagi, lembaga penerbitan dan karya sastra terbitan pemerintah Belanda diarahkan untuk membangun kepatuhan dan kekaguman masyarakat pribumi terhadap kekuasaan Barat sehingga selamanya pribumi menjadi *inlander*, *objek*, *the orient*, dan *marginal*.

Sastra memberi pencerahan secara tidak langsung sehingga pembaca dituntut memiliki kecerdasan dalam memahami dan mengambil nilai dalam karya sastra. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pencerahan wawasan seseorang perlu membaca berbagai karya sastra, baik dalam *genre* yang sama atau variasi *genre*. Sebagai misal, pentingnya orangtua mendorong anak-anaknya untuk mencari bekal kehidupan dapat disimak dalam karya puisi berjudul “Surat dari Ibu” karya Asrul Sani dan “Menyesal” karya A. Hamsy. Sajak atau puisi “Surat dari Ibu” dan “Menyesal” memberikan pencerahan pemikiran agar pembaca dapat menyiapkan masa dengan memanfaatkan waktu muda sebagai pencari bekal. Hal itu senada dengan harapan orangtua kepada anaknya untuk menyiapkan masa depannya. Bahkan, kedua puisi itu tidak jauh semangatnya dengan pantun *berakit-rakit ke hulu, berenang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian* sebagai nasihat arif dari nenek moyang bangsa Indonesia dan lebih indah jika dipadukan dengan nasihat cerdas *sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui* atau *sambil menyelam minum air*.

Saya akan menyinggung sedikit keberadaan ungkapan lokal dalam berbagai suku bangsa di Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan karakter. Ungkapan berupa peribahasa itu juga wilayah kajian bahasa dan sastra. Jika diperbandingkan lintas suku bangsa, dapat diketahui hubungan kemiripan cara pandang dan cara pikir masyarakat lintas budaya. Untuk membangun komunikasi sosial, hampir semua suku bangsa memiliki ungkapan yang mendorong masyarakat menyadari pentingnya perilaku sosial yang mengarah terhadap karakter sosial-gotong royong. Dalam bahasa Bali dikenal *ada kutang apang ada duduk, ada pejang apang ada jemak* ‘ada dibuang supaya ada dipungut, ada ditaruh supaya ada diambil’ (seorang yang suka menolong pastilah akan ditolong jika dalam kesulitan); dalam budaya Banjar dikenal *badiri sadang, baduduk sadang* ‘berdiri cocok, duduk juga cocok’ (seorang yang pandai menyesuaikan diri dengan situasi); dalam budaya Jawa dikenal *dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan* ‘bukan saudara bukan kerabat, tapi ketika meninggal turut kehilangan’, *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* ‘rukun menjadikan kuat, berselisih mengakibatkan rusak’; dalam budaya Gorontalo dikenal *mopotuwasu kalibi,kauli, wawu pi’ili* ‘menyatukan hati, perkataan, dan perbuatan’ sebagai gambaran kebutalan tekad dalam membangun kehidupan sosial yang harmoni (Suratno, 2016). Semua ungkapan lokal itu merupakan media pembentukan budaya yang mendorong hidup harmoni berdampingan dalam keberagaman (bahasa, adat, budaya, mata pencarian, dan sebagainya). Oleh karena itu, ketika dalam satu komunitas yang luas terdiri dari berbagai latar budaya dapat dirajut kehidupan yang damai dan rukun karena dari asalnya setiap suku bangsa dibekali nilai-nilai sosial-harmoni. Dalam konteks sastra kolonial perlu tuntunan ahli sastra budaya dalam memaknainya. Setelah mengetahui bahwa karya sastra pada waktu itu sebagai media pelanggaran kekuasaan kolonial Belanda, kita perlu mengambil sisi tertentu sehingga mendapat manfaat dari karya sastra kolonial. Dalam konteks wacana kolonial terjadi terjadi relasi dominasi atau *subjek-objek* atau *sentral-marginal* antara penguasa dan pribumi.

Bahasa atau wacana memberi ruang bagi dominasi dari satu pihak terhadap pihak lain (Fairelough, 1989: 2). Sejalan dengan pemikiran Fairelough (Badara, 2012: 26 juga Jorgensen dan Phillips, 2007; Ibrahim, 2009, editor), keberadaan wacana kolonial dapat dipandang sebagai media praktik sosial. Sementara itu, analisis wacana dapat dilakukan melalui representasi, relasi, dan identitas yang tergambar dalam wacana bahasa. Dengan demikian, analisis sastra Indonesia atau novel Jawa pada masa kolonial perlu dilakukan dalam dimensi teks (*text*), praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosial (*social practice*). Ketiga unsur atau dimensi itu menjadi kesatuan dalam analisis wacana kolonial karena ketiganya saling terkait. Kajian wacana kritis tidak hanya memandang teks dari signifikansi bahasa, tetapi menganalisis bahasa dari aspek konteks (Darma, 2009: 51). Dari segi konteks, bahasa digunakan untuk tujuan praktis, baik praktis kekuasaan maupun sosial-budaya. Bahkan, kajian dapat menyangkut aspek makro,

misalnya latar atau proses produksi wacana (dalam hal ini teks novel Jawa terbitan *Balai Pustaka* pada prakemerdekaan). Untuk itu, kajian akan mendeskripsikan kebijakan kolonial Belanda dalam mendirikan penerbit pemerintah (yakni *Balai Pustaka*) dan fungsi bacaan bagi masyarakat pribumi yang tidak terlepas dari dominasi *subjek* terhadap *objek*. Fairclough (1989) menyatakan bahwa terjadi dialektika (hubungan timbal-balik) antara sosial-budaya dengan wacana yang ada. Bahkan, dalam hubungan fungsi dapat dinyatakan bahwa wacana (teks sastra) memengaruhi tatanan sosial, sedangkan tatanan sosial memengaruhi sastra.

Sastra kolonial, secara nyata, sengaja dijadikan media untuk memproteksi pembaca dan masyarakat pribumi untuk mengikuti budaya *Barat*. Tidak hanya itu, melalui sastra Barat mencitra bahwa masyarakat *Timur* harus dibentuk, diajari, dan berguru kepada *Barat* sehingga masyarakat pribumi sangat berorientasi terhadap orang Barat. Secara tekstual, wacana sastra kolonial sangat mengedepankan *oposisi* posisi seseorang, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, *oposisi* itu terjadi dalam konteks perbedaan status masyarakat pribumi, yang membedakan kelompok *priayi* dan *wong cilik* atau *orang awam*, *ningrat* dan *rakyat biasa*. Dalam relasi ini *wong cilik*, *orang awam*, dan *rakyat biasa* (atau *priyayi kutha* beroposisi dengan *wong ndesa*) berusaha memasuki kehidupan *priyayi* dan kalangan *terhormat*, melalui pendidikan dan sebagainya (*ngenger* atau mengabdikan kepada kaum *priayi* atau *bangsawan*). Sering kali, *wong cilik* atau *orang awam* diperlakukan secara tidak adil oleh kaum *ningrat* atau *priayi*, bahkan dimarginalkan sebagai *objek* (terjadi dalam novel *Sukaca* (1923) dan *Suwarso-Warsiyah* (1926), dan *Wisaning Agesang* (1928)). Dalam hubungan ini, *wong cilik* dan *orang awam* atau *ndesa* sebagai objek yang segalanya ditentukan oleh *priyayi* atau orang kutha (tiyang negari). Di samping itu, masih terjadi relasi *subjek-objek* antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan yang setara. Dalam, hubungan vertikal *oposisi* laki-laki perempuan lebih lemah dibandingkan dengan *oposisi* ningrat dan *wong awam* atau *ndesa*.

Kedua wacana sastra dijadikan sebagai upaya dominasi secara *oposisi* antara masyarakat terjajah dan penjajah dalam relasi objek-subjek. Barat berposisi sebagai subjek, sedang Timur sebagai objek. Hal itu juga terjadi dalam pencitraan atau karakterisasi pribumi sesuai dengan kemauan Barat. Masyarakat Barat menempatkan diri sebagai superior, subjek, jujur, bersolidaritas, sosial, bersih, dan sebagainya (sedangkan Timur atau pribumi diwacanakan dengan karakter pemalas, pembohong, peminum, penjudi, bodoh, tidak jujur, takhayul, dan sejenisnya). Oleh sebab itu, melalui forum ini saya hendak menyampaikan bahwa sifat masyarakat pribumi yang pemalas, bodoh, menyatu dengan alam, berpikir dengan perasaan, dan kebelanda-belandaan, dan sejenisnya (seperti terdapat novel Jawa *Tuhunung Katresnan* (1918), *Sukaca* (1923), *Wisaning Ageng* (1928), *Suwarso-Warsiyah* (1926), *Lelampahan Pitu Likur Taun* (1929), *Saking Papa dumugi Mulya* (karya Mw. Asmawinangun, 1928), *Gawaning Wewatekan* (1928), *Mungsuh Mungging Cangklakan* (1929), *Larasati Modern* (1938), *Ngantepi Tekad* (1925), *Pepisahan Pitulikur Taun* (1929), *Ngulandara* (1936), *Siti Nurbaya*, *Salah Asuhan*, dan beberapa cerpen Indonesia *Robohnya Surau Kami* (karya A.A. Navis), *Haji Mabror* (karya Izatul Jannah), *Mata yang Enak Dipandang* (karya Ahmad Tohari), dan *Pemilu* (karya Krishna Mihardja) tidak terlepas dari pencitraan kolonial, atau setidaknya pengaruh dari cara pandang kolonial Belanda.

Dari dimensi kewacanaan sastra, baik Indonesia dan Jawa, terbitan *Balai Pustaka*, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonial Belanda dalam mendominasi pribumi. Sastra pada masa itu disengaja sebagai media bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mendeskreditkan masyarakat pribumi. Sebagai objek dari pemerintah kolonial Belanda, tokoh cerita yang ditampilkan dalam novel Indonesia dan Jawa (ketika itu novel berbahasa Melayu) dapat dipastikan sebagai sosok atau figur yang negatif (kecuali tokoh cerita orang Belanda). Hal itu juga terjadi dalam novel Jawa secara dominan sehingga terdapat *oposisi* karakter antara tokoh cerita orang Belanda (sebagai *superior*) dan Jawa (pribumi sebagai *inferior*). Bahkan, orang Jawa yang menjadi istri orang Belanda pun tetap berkarakter buruk karena tunduk pada politik kekuasaan bahwa pribumi itu the *Orient*, objek, dan sebagainya. Sebagai misal, bekas istri orang Belanda yang berkarakter buruk adalah Raden Ajeng Sujinah dalam novel *Wisaning Agesang*

karya Suradi Wiryaharsana (*Bale Pustaka*, 1928), perilaku buruk itu timbul setelah berpisah dengan orang Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah bagi anak pribumi sebagai balas karena telah mengambil keuntungan dari negara jajahan yang disebut sebagai politik balas jasa atau *etische politiek* ‘politis etis’. Sehubungan dengan itu, kehadiran bacaan sastra *Balai Pustaka* merupakan (1) media bagi pemerintah kolonial Belanda dalam mendominasi pemikiran masyarakat pribumi dan (2) media pencerahan bagi masyarakat pribumi dalam memasuki kehidupan baru sesuai dengan pemikiran Barat (Suratno, 2013: xii—xiii). Pemerintah kolonial Belanda menempatkan diri sebagai *the Occident*, sedangkan pribumi atau masyarakat timur sebagai *the Orient*. Masyarakat Barat berada pada posisi *superior*, sedangkan pribumi diposisikan sebagai *inferior*. Faruk (1998:2) menyebut bahwa kolonial Belanda menempatkan dirinya sebagai *subjek* dengan arogansinya terhadap masyarakat pribumi.

Penjajahan Belanda (Barat) terhadap Indonesia (Timur) tidak hanya terjadi dalam bidang material (ekonomi dan politik), melainkan juga terjadi dalam bidang budaya yang tampak dalam merepresentasikan dan mendefinisikan Timur sebagai *yang lain* dari Barat. Hubungan itu merupakan bentuk orientalisme yang merupakan gaya Barat dalam mendominasi, memahami, menata, dan menguasai Timur (Said, 1996: 2—4). Sementara itu, menurut Bhaba (1985: 100) adalah menafsirkan masyarakat terjajah sebagai ras yang dilemahkan untuk melakukan penguasaan. Oleh karena itu, untuk memahami konfigurasi kekuasaan Barat terhadap pribumi yang diciptakan oleh kolonial, termasuk konfigurasi yang terkait dengan lembaga budaya. Dalam konteks yang lebih tinggi, konfigurasi kolonial terhadap pribumi dapat dilihat dalam tekanan-tekanan suprastruktural dan detail-detail komposisi, yakni berupa realitas tekstual (Said, 1995: 16—17).

Pendirian *Balai Pustaka* sebagai penyedia dan pen-*support* bacaan bagi sekolah pribumi merupakan satu paket kebijakan kolonial. Semua itu bermuara pada pembentukan sikap pribumi modern yang patuh terhadap kekuasaan kolonial. Melalui bacaan standar dari *Balai Pustaka* diharapkan para siswa di sekolah formal terhindar dari bacaan liar yang diusahakan oleh pihak swasta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemerintah kolonial tidak sepenuh hati melaksanakan pendidikan bagi masyarakat pribumi (Suratno, 2013: 41). Belanda belajar dari kondisi yang dialami oleh Inggris yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat India akibat pelaksanaan pendidikan Eropa modern. Maka dari itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengawal dan mendominasi pendidikan formal dengan cara menyediakan bacaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak menghendaki munculnya sikap *agitasi* atau perlawanan dari masyarakat pribumi sebagai akibat kemajuan intelektual masyarakat pribumi melalui pendidikan formal modern.

Karya sastra pada masa itu tidak terlepas dari praktik sosial-budaya sejalan dengan pernyataan Junus (1998: 1), Bhaba (1985 dalam Parry 1994: 37—38)) yang menyebut bahwa hubungan pemerintah Belanda dengan pribumi bukan pada posisi biner, melainkan dalam konteks *hierarkis* dan berjenjang dengan penjajah menempatkan dirinya sebagai *master*. Pribumi (masyarakat Jawa) ditempatkan atau dipahami sebagai kelompok atau masyarakat yang memiliki peran *korporeal*, bersifat *wadag* (atau lahir dan fisik), *liar*, *instingtif* (atau takhayul dan berdasarkan perasaan), dan *kasar* sehingga terbuka peluang untuk penguasaan sebagai bagian integral dari sistem kolonialisme (Gilbert dan Jacqueline Lo, 1998: 10; Suratno, 2013: 13).

Penerapan praktik sosial-budaya dalam analisis wacana kritis menurut Fairclough dapat disimak dalam representasi penerbit *Balai Pustaka*. Sudah pasti novel-novel Jawa dan Melayu pra-Kemerdekaan yang merepresentasikan kebijakan kolonial cukup memadai. Masyarakat Jawa (pribumi) dipahami sebagai orang yang tidak berpikir relaistik dan cenderung feodal. Sikap feodal, sebagai contoh, terdapat dalam novel *Suwarso-Warsiyah* dimiliki oleh sikap dan pemikiran Raden Nganten Bei Harjakatara yang sangat menonjolkan status sosialnya sebagai seorang *priayi* atau *ningrat*. Bahkan, sebagai istri seorang *priayi*, Raden Nganten Bei Harjakatara dirinya memandang sangat rendah terhadap seseorang yang tidak berstatus *priayi* dan orang *ndesa*. Sikap itu tampak pada tindakannya yang secara sepihak memerintahkan

adiknya (Mas Rangga Citrakatara) agar menceraikan istrinya karena perempuan itu berasal dari keluarga orang desa. Pada akhirnya, Mas Rangga Citrakatara menceraikan istrinya tanpa berpikir realistis. Dalam pandangan Mas Citrakatara, istrinya yang berasal dari desa (bernama Warsiyem) memiliki sikap dan kepribadian yang baik (menurutnya perempuan itu cantik, rapi dalam menata rumah tangga, hemat dan pandai mengelola ekonomi keluarga, menghormati suami, dan beretika bagus). Akan tetapi, karena tidak mampu berpikir realistis-objektif, Mas Rangga Citrakatara secara sepihak, menceraikan Warsiyem berkat tergiur pandangan Raden Nganten Bei Harjakatara. Pada akhirnya, Mas Rangga Citrakatara menikah dengan perempuan priayi (disebut seorang putri oleh kebanyakan kaum *ningrat*). Namun, perjalanan perkawinannya tidak berlangsung baik sehingga Mas Rangga Citrakatara menyesali keputusannya telah menceraikan Warsiyem. Terbukti perempuan ningrat yang dinikahi oleh Mas Citrakatara tidak memiliki kecerdasan yang memadai. Hal itu tampak dari cara mendidik anaknya (Sudarsa) yang berakhir dengan karakter Sudarsa yang buruk (menjadi sosok yang manja, boros atau suka berpoya-poya, pemabuk, bermain perempuan, berjudi, dan sebagainya). Sementara itu, istri Mas Citrakatara juga bukan perempuan yang berkarakter bagus (sebagai seorang *ningrat* atau *priyayi* dirinya bersikap tidak jujur dalam pengelolaan ekonomi keluarga). Bahkan, pribumi dikarakterisasi sebagai sosok yang berwatak *culas* (dalam bahasa Jawa disebut *judas*), berwatak binatang (disebut *ewan* sebagai gambaran seorang yang tidak memiliki etika dan belas kasih terhadap orang lain), dan sulit dipahami sikap dan wataknya (disebut *angel sratenanipun*).

Dalam konteks di atas, secara praktik, pemakaian bahasa dan kehadiran karya sastra adalah menyesuaikan atau diarahkan oleh situasi kehidupan masyarakatnya. Dalam kehidupan bangsa Indonesia pada dewasa ini memiliki problematika yang dinilai berkorelasi dengan kehidupan masa depan bangsa. Dari berbagai problematika bangsa itu, antara lain, adalah merosotnya nilai-nilai etika, kejujuran, sosial, moral, dan disintegrasi bangsa. Kemudian, masalah yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bahasa dan sastra memiliki ruang dalam turut serta menangani problematika bangsa tersebut. Bahasa dan sastra dalam konteks ini harus dipandang dalam arti luas, yang melibatkan kehadiran pengarang, penerbit, dan pembaca. Dengan demikian, pemakai bahasa dan pengarang sastra harus menyadari tanggung jawab moral dalam mencipta kehidupan masyarakat masa kini dan masa depan. *Kedua*, pemilik modal dan masyarakat Indonesia dan penerbit sastra perlu membangun kesadaran untuk mengekspresikan pikiran dengan bahasa dan sastra dalam rangka memberikan pencerahan pemikiran bagi upaya-upaya mengatasi masalah kebangsaan. *Ketiga*, masyarakat dan pembaca sastra perlu memiliki keyakinan bahwa dirinya perlu menyadari bahwa berbahasa dan bersastra dapat menyegarkan pemikirannya guna menyadari pentingnya memahami dan turut terlibat dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan nasionalisme yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Jika sinergi ini dapat dibangun, pemakaian bahasa yang bermartabat dan kehadiran karya sastra yang berkualitas menjadi sesuatu yang *ditunggu* dan *dibutuhkan*, bahkan dijadikan media pioner dalam pemecahan dan penanganan masalah-masalah tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setidaknya, setiap orang perlu memikirkan dampak terhadap masyarakat secara luas dalam berbahasa dan bersastra karena pada dasarnya bahasa dan sastra merupakan representasi dari pemikiran dan atau kekuasaan. Bahkan, dampak dari pemakaian bahasa dapat mengenai diri penutur atau penulis ketika bahasa yang digunakan menimbulkan perasaan tidak senang dan melecehkan pihak lain, hingga berujung pada perkara di pengadilan. Selanjutnya, karya sastra juga berdampak positif dan negatif terhadap individu, masyarakat, dan bangsa sehingga insan sastra perlu menyadari kehadiran sastra tidak netral, tetapi memiliki konsekuensi logis baik terhadap pemikiran masyarakat pada masa kini dan masa depan, bahkan terhadap kekuasaan.

Daftar Pustaka Bacaan

- Atmawasita. 1925. *Ngantepi Tekad*. Weltevreden. Bale Pustaka.
- Asmawinangun, Mw. 1928. *Saking Papa dumugi Mulya*. Weltevreden. Bale Pustaka.
- 1929. *Mungsuh Mungging Cangklakan*. Weltevreden. Bale Pustaka.
- 1929. *Pepisahan Pitu Likur Taun*. Weltevreden. Bale Pustaka.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Darma, Yoce. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Irama Widya.
- Djakalelana. 1932. *Gambar Mbabar Wewados*. Batavia-Centrum. Bale Pustaka.
- Djayaatmadja, Margana. 1936. *Nguladara*. Jakarta. Bale Pustaka.
- Fairelough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman.
- 1995. *Critical Discourse Analysis*. New York: Addison Wesley Longman.
- Faruk. 1994. "Novel-Novel Indonesia Tradisi Balai Pustaka". Disertasi pada Universitas Gadjahmada Yogyakarta.
- Foulcher, Keith. 1999. "Mimikri dan Ambivalensi dalam Siti Nurbaya: Catatan untuk Faruk HT." Makalah untuk Diskusi Majalah Kalam.
- Gilbert, Helen dan Jacqueline Lo. 1998. *Postkolonial Theory: Possibilities and Limitations*. Sydney: Studies University of Sydney.
- Ibrahim, Abdul Syukur (Editor), 2009. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jorgensen Marianne W. dan Jouise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana: Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjataraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Mardianto, Heryy. 1996. *Pemilihan Lurah: Antologi Cerita Cekak dan Geguritan*. Yogyakarta: Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta.
- Pamoentjak, St. 1948. *Balai Pustaka Sewajarnya 1908—1942*. Yogyakarta: Tanpa Nama Penerbit.
- Riclefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern* (Terjemahan Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rusli, Marah. 1922. *Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai*. Twelveth Printing-Jakarta Balai Pustaka.
- Said, Edwar W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat* (Terjemahan Astuti). Bandung: Penerbit Mizan.
- 1996. *Orientalism* (Terjemahan Hikmat). Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sastradiharja. 1926. *Suwarso-Warsiyah*. Weltevreden: Bale Pustaka.
- Sastradiarja, *Suratman*. 1923. *Sukaca*. Weltevreden: Bale Pustaka.S
- Sri. 1936. *Larasati Modern*. Batavia-Centrum. Bale Pustaka.
- Soeratman, M. 1920. *Katresnan*. Weltevreden. Bale Pustaka.
- Suratno, Pardi. 2013. *Masyarakat Jawa & Budaya Barat: Kajian Sastra Jawa Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit Adi Wacana.
- 2016. "Sumbangan Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Karakter" makalah dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan Universitas Pekalongan dan Balai Bahasa Jawa tengah, pada 26 Juli 2016 bertempat di Univeristas Pekalongan.
- Teeuw, A. 1986. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya,
- Wiryaharsana, Suradi. 1928. *Wisaning Agesang*. Weltevreden: Bale Pustaka.